

Corresponding author: Naila Ahmad, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta, Indonesia.

E-mail: 2310413017@mahasiswa.upnvj.ac.id

RESEARCH ARTICLE

Manifestation of Patriarchal Culture towards Women Legislative Candidates: An Analysis of Negative Comments on Instagram @Bebizie as a PAN Cadre in the 2024 Election

Naila Ahmad*, Salwa Alfira, Clarissa Fortuna Paripurna, Firman

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract: Women's participation in politics in Indonesia is still hampered by a strong patriarchal culture, despite policies that support women's representation. This research aims to analyze the negative comments received by Bebizie Fatlanay, a female legislative candidate from the National Mandate Party (PAN), on Instagram ahead of the 2024 elections. The method used is qualitative with an analytical descriptive approach and literature study. The results showed that negative comments more often attacked personal aspects and undermined women's political abilities, thus reflecting gender stereotypes that are still rooted in society. The conclusion of this study is that patriarchal culture not only affects people's perceptions, but also limits women's participation in politics. The importance of gender education and quota policies is expected to increase support for women legislative candidates and create a more inclusive political environment.

Keywords: Patriarchal Culture, Women Legislative Candidates, Negative Comments, Social Media, Gender

1. INTRODUCTION

Partisipasi perempuan dalam politik telah menjadi isu penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang inklusif, berkeadilan gender, dan demokratis. Politik yang inklusif tidak hanya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan, hak, dan kebutuhan semua kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dapat terwakili secara adil dan merata. Representasi politik perempuan menjadi kunci, jika kita ingin mewujudkan demokrasi yang ramah gender (Nurchahyo, 2016). Di Indonesia, meskipun reformasi politik yang dimulai pada akhir 1990-an telah membuka banyak peluang bagi keterlibatan perempuan dalam politik, namun tantangan besar berupa budaya patriarki yang mendalam masih menjadi hambatan utama. Budaya patriarki ini menciptakan ketidaksetaraan struktural yang membatasi ruang gerak perempuan. Kesetaraan gender, yang seharusnya menjadi landasan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan hukum dan derajat hidup yang setara, masih menjadi isu kontroversial dan penuh tantangan. Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, pengaruh budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat sering kali memunculkan resistensi terhadap perubahan. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap lebih rendah, dan peran mereka sering kali terbatas pada pekerjaan domestik dan urusan keluarga. Ketika perempuan mencoba memasuki ranah kepemimpinan atau politik, mereka sering dipandang dengan skeptisisme. Masyarakat



cenderung menganggap mereka sebagai “kelas kedua”, yang secara sosial dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Opy, 2022). Pandangan semacam ini memperkuat diskriminasi, menghambat kemajuan perempuan, dan memperpanjang ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung dalam berbagai lapisan masyarakat.

Budaya patriarki terbentuk melalui norma-norma sosial yang terinternalisasi, di mana laki-laki ditempatkan dalam posisi dominan dan dihormati karena dianggap memiliki sifat maskulinitas yang melekat padanya. Sebaliknya, perempuan sering dipandang sebagai makhluk yang lebih lemah, dengan peran yang dianggap sebagai pendukung atau pelengkap bagi laki-laki. Pandangan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting, seperti yang terlihat dari representasi mereka di parlemen, yang merupakan prasyarat mutlak untuk pengambilan kebijakan publik yang responsif terhadap kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan yang memadai, kebijakan yang diambil cenderung berfokus pada kepentingan laki-laki, yang berpotensi merugikan perempuan. Aktivitas perempuan dalam politik kini semakin didorong dengan hadirnya media sosial sebagai alat kampanye yang efektif. Platform seperti Instagram memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, meskipun Instagram memberi kebebasan berekspresi, ruang publik digital ini juga sering menjadi arena perdebatan ideologi dan nilai sosial, termasuk isu gender. Komentar-komentar negatif yang muncul di platform ini mencerminkan bahwa budaya patriarki masih mengakar kuat, bahkan di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, budaya patriarki tetap menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender.

Tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik dapat terlihat jelas melalui keterlibatan mereka dalam Pemilu 2024, di mana bias gender dan budaya patriarki masih memengaruhi cara masyarakat memandang perempuan yang terjun ke ranah politik. Bebizie Fatlanay, yang juga dikenal sebagai Sari Sri Mulyati, adalah salah satu calon legislatif perempuan yang sempat menarik perhatian publik pada Pemilu 2024. Sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN), Bebizie sebelumnya dikenal sebagai penyanyi dangdut dan pernah berakting dalam film televisi berjudul “Pernikahanku Ternodai Sejak Awal”. Kini, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, mewakili daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Meskipun memiliki komitmen untuk berkontribusi sebagai anggota legislatif, Bebizie menghadapi berbagai komentar negatif yang menyerang dirinya, baik terkait kapasitas politiknya maupun isu gender. Komentar-komentar bernada negatif yang banyak muncul di akun Instagram @Bebizie menggambarkan tantangan besar yang dihadapi perempuan dalam mengakses kekuasaan politik, terutama di tengah dominasi budaya patriarki. Pemberitaan mengenai calon legislatif perempuan sering kali dibumbui dengan bias dan seksisme, yang tidak hanya meragukan kemampuan mereka, tetapi juga merendahkan keberanian mereka untuk terjun ke dunia politik. Fenomena ini mencerminkan masih adanya ketimpangan gender yang mengakar kuat dalam ruang publik dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan jenis komentar negatif yang diterima oleh Bebizie sebagai calon legislatif perempuan di media sosial Instagram, serta dampaknya terhadap citra diri dan partisipasinya dalam dunia politik. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana budaya patriarki memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan, khususnya melalui komentar-komentar di Instagram. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi stigma negatif serta meningkatkan dukungan dan representasi perempuan dalam dunia politik. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik di Indonesia, serta peran media sosial, khususnya Instagram, dalam membentuk atau mengubah stereotip gender.

2. Literatur Review

2.1. Penelitian Terdahulu

Budaya patriarki telah lama menjadi faktor penghambat utama bagi keterwakilan perempuan dalam dunia politik, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Nimrah dan Sakaria (2015), yang mengidentifikasi bahwa budaya patriarki, proses seleksi di partai politik, pengaruh media, dan kurangnya jaringan dukungan, menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan posisi di lembaga legislatif. Penelitian mereka yang menggunakan metode telaah pustaka ini memberikan pandangan teoritis yang luas mengenai peran budaya patriarki dalam politik, namun belum banyak membahas bagaimana budaya ini termanifestasi di platform digital. Penelitian kami bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengkaji komentar negatif yang muncul di media sosial, khususnya di akun Instagram @bebizie, sebagai salah satu kader Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilu 2024. Melalui analisis ini, kami ingin mengungkap bagaimana budaya patriarki muncul di ruang digital, yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap calon legislatif perempuan. Selain itu, penelitian Dwitarsari et al. (2024) menyoroti keberhasilan dua calon legislatif perempuan dalam membangun citra positif melalui personal branding yang efektif, dengan fokus pada prinsip-prinsip seperti spesialisasi, kepemimpinan, dan visibilitas. Namun, meskipun keberhasilan ini tercatat, mereka juga menemukan bahwa stereotip gender tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi, di mana perempuan sering dianggap kurang mampu dalam memimpin. Penelitian ini lebih berfokus pada strategi branding yang berhasil diterapkan oleh perempuan dalam politik, namun tidak mengkaji bagaimana stereotip gender ini muncul dalam bentuk komentar negatif di media sosial, yang menjadi fokus utama dalam penelitian kami. Dengan demikian, penelitian kami berusaha untuk menggali lebih dalam bagaimana stereotip gender yang muncul di media sosial khususnya Instagram, berfungsi untuk memperkuat budaya patriarki yang ada, dan bagaimana hal ini memengaruhi persepsi serta partisipasi perempuan dalam politik.

Penelitian lain oleh Inwantoro dan Herawati (2014), juga menemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah calon legislatif perempuan, banyak faktor yang masih menghambat partisipasi mereka, termasuk dominasi budaya patriarki dan rendahnya kualitas dukungan dari partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap pentingnya representasi perempuan dalam politik, kenyataannya perempuan masih menghadapi banyak tantangan. Namun, penelitian ini belum menggali bagaimana media sosial memengaruhi persepsi publik terhadap perempuan dalam dunia politik, terutama dalam menghadapi komentar negatif yang sering kali muncul di platform digital. Penelitian kami berfokus pada fenomena tersebut, dengan menganalisis komentar negatif yang diterima oleh calon legislatif perempuan di Instagram, yang tidak hanya mencerminkan pandangan patriarkal masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat stereotip gender yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Dengan demikian, penelitian kami memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana media sosial, khususnya Instagram, dapat menjadi arena bagi manifestasi budaya patriarki. Melalui penelitian kami, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi dan partisipasi perempuan dalam ranah politik di Indonesia.

2.2. Landasan Teori

a. Patriarki

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Dalam politik, patriarki memperkuat pandangan bahwa dunia politik adalah ranah laki-laki, sehingga perempuan sering kali menghadapi hambatan besar ketika mencoba memasuki dunia tersebut. Mereka kerap diserang dengan ujaran kebencian, penilaian negatif terhadap

kemampuan mereka, serta komentar seksis yang mengkritik moralitas atau penampilan fisik mereka. Serangan ini mencerminkan struktur sosial yang lebih besar yang terus memperkuat norma-norma patriarkal. Patriarki juga merupakan konstruksi sosiologis yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga membentuk peran gender yang akhirnya menjadi budaya turun-temurun yang sulit diubah (Sanderson & Stephen K, 2001). Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti kekuatan fisik, sering dijadikan alasan untuk menegakkan ketidaksetaraan sosial, dengan perempuan dianggap lebih lemah dan kurang layak memegang peran kekuasaan (Nurchahyo, 2016). Meskipun budaya patriarki seringkali menempatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih superior dan perempuan sebagai subordinat (Yusalia, 2014), kehadiran perempuan dalam politik justru menantang norma-norma tersebut serta menunjukkan perlawanan terhadap struktur patriarkal yang telah mapan. Perempuan dalam politik tidak hanya berusaha melawan stereotip gender, tetapi juga berupaya meruntuhkan berbagai hambatan yang membatasi partisipasi mereka di ruang publik. Oleh karena itu, perempuan seharusnya memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dan memimpin dalam dunia politik, sama halnya dengan laki-laki.

b. Performatif Gender

Performatif gender adalah konsep yang diperkenalkan oleh Judith Butler dalam bukunya *Gender Trouble* (1990). Istilah performatif mengacu pada gagasan bahwa identitas, makna, atau realitas sosial terbentuk melalui tindakan dan ucapan. Sementara itu, gender merujuk pada karakteristik pribadi dan psikologis yang dipandang sebagai ciri khas laki-laki atau perempuan, yang ditentukan oleh norma sosial berdasarkan jenis kelamin (Brewer et al., 2001). Gender bukanlah sesuatu yang melekat pada individu, melainkan sebuah serangkaian tindakan yang lebih tepat disebut sebagai "melakukan" daripada "menjadi" (Sara Salih, 2006). Dengan demikian, gender dapat dipahami sebagai sesuatu yang "dilakukan" melalui ekspresi dan tindakan yang secara berulang menguatkan norma sosial, sehingga membentuk persepsi tentang laki-laki atau perempuan. Gender lebih berfokus pada kegiatan yang mencerminkan representasi jenis kelamin seseorang. Konsep performatif gender ini menunjukkan bahwa identitas gender terbentuk melalui apa yang seseorang lakukan, bukan apa yang mereka "miliki". Lebih jauh lagi, konsep ini menegaskan bahwa gender bersifat cair dan dapat berubah, karena tidak terikat pada esensi biologis. Dalam perspektif ini, tindakan yang bertentangan dengan norma gender tradisional dianggap sebagai bentuk subversi terhadap tatanan patriarkal yang mendikte perilaku berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, gender bukanlah sesuatu yang dimiliki individu secara alami, melainkan sesuatu yang "ditampilkan" atau dipraktikkan untuk memenuhi norma sosial tertentu (Erving Goffman, 1959). Oleh karena itu, gender dipahami sebagai identitas yang terbentuk melalui proses dinamis dan tindakan performatif, bukan sesuatu yang bersifat esensial atau statis.

3. Research Method and Materials

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2007:209). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi serta data yang relevan terkait manifestasi budaya patriarki dalam komentar negatif terhadap calon legislatif perempuan di Instagram, khususnya pada akun @bebizie yang merupakan kader PAN dalam Pemilu 2024. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan data melalui deskripsi berbasis kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari komentar negatif netizen di media sosial (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2006). Pendekatan ini memungkinkan penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan bermakna (Sugiyono, 2013). Penelitian ini juga menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengkaji komentar-komentar negatif di platform Instagram, dengan fokus pada tema-tema yang mencerminkan bias gender, stereotip, dan manifestasi budaya patriarki. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola komunikasi dan narasi yang mencerminkan budaya patriarki dalam konteks politik. Selain itu, studi pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Studi pustaka mengacu pada sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel,

dan laporan penelitian, yang berfungsi untuk menganalisis fenomena budaya patriarki dan bias gender terhadap perempuan dalam politik. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana budaya patriarki memengaruhi persepsi publik terhadap calon legislatif perempuan, khususnya melalui media sosial. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa analisis terhadap komentar negatif di Instagram @bebizie serta sumber-sumber tertulis terkait. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses observasi, interpretasi, dan analisis data.

4. Result and Discussion

4.1. Komentar Negatif yang diterima oleh @Bebizie sebagai Calon Legislatif Perempuan di Media Sosial Instagram

Media sosial seperti Instagram, kini menjadi salah satu alat utama dalam kampanye politik modern. Platform ini memungkinkan calon legislatif untuk membangun citra diri yang lebih personal dan mempermudah interaksi langsung dengan masyarakat. Dalam konteks ini, Bebizie, sebagai seorang calon legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilu 2024, memanfaatkan Instagram untuk memperkenalkan dirinya kepada publik. Namun, di balik potensi positif media sosial, muncul tantangan besar yang mencerminkan kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia. Sebagai figur publik perempuan, Bebizie dihadapkan pada ekspektasi sosial yang kerap bias gender. Masyarakat cenderung memiliki pandangan tradisional tentang peran perempuan, yang sering kali mengesampingkan keterlibatan mereka dalam ranah politik. Ekspektasi ini terinternalisasi dalam bentuk komentar negatif yang diterima Bebizie di Instagram. Komentar-komentar tersebut bukan sekadar kritik politik, tetapi sering kali menyerang aspek-aspek personal seperti penampilan, moralitas, atau kesesuaiannya sebagai perempuan dalam dunia politik. Komentar negatif terhadap perempuan di ranah politik, seperti yang dirasakan Bebizie, mencerminkan stereotip gender yang masih mengakar kuat. Stereotip ini menganggap perempuan kurang kompeten atau tidak pantas untuk memimpin. Dengan demikian, komentar negatif tersebut tidak hanya menyerang individu, tetapi juga mencerminkan resistensi terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Berikut adalah berbagai komentar negatif yang diterima oleh Bebizie di Instagramnya :



Figure 1: Komentar Negatif pada Unggahan Bebizie
(Sumber: Hasil Tangkapan Layar dari Instagram @bebizie)

Komentar negatif diatas, yang ditujukan kepada Bebizie mencerminkan bias patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Sebagai calon legislatif perempuan dari PAN, Bebizie tidak hanya menghadapi tantangan politik, tetapi juga prasangka sosial yang mempertanyakan kelayakan perempuan di ranah publik. Komentar seperti "prestasi nya apa?", menunjukkan adanya standar ganda, di mana perempuan dituntut untuk membuktikan kemampuan mereka secara berlebihan dibandingkan laki-laki. Sementara itu, komentar "apa ini anjer visi misinya kagak ada", lebih bernada meremehkan daripada kritik yang konstruktif. Nada sarkastik ini cenderung mengabaikan substansi program yang mungkin telah Bebizie sampaikan, sekaligus mencerminkan pandangan bahwa kandidat perempuan dianggap tidak serius atau kurang kredibel. Kritik seperti ini memperkuat pandangan bahwa politik adalah ruang dominasi laki-

laki, sehingga kehadiran perempuan sering kali direndahkan atau dianggap anomali. Komentar-komentar ini tidak hanya merugikan Bebizie sebagai individu, tetapi juga membatasi ruang perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam politik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pandangan masyarakat agar lebih fokus pada substansi, seperti visi dan misi kandidat, daripada mempertahankan narasi yang merugikan perempuan.



Figure 2: Komentar Negatif pada Unggahan Bebizie
(Sumber: Hasil Tangkapan Layar dari Instagram @bebizie)

Komentar negatif yang ditujukan kepada Bebizie, seperti tuduhan "ani-ani", merupakan bentuk serangan pribadi yang tidak hanya mencemarkan nama baiknya, tetapi juga menunjukkan bagaimana budaya patriarki masih mendominasi cara pandang masyarakat terhadap perempuan di ranah politik. Bebizie sebagai calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), menghadapi tantangan besar ketika mencoba mengukuhkan dirinya sebagai politisi yang kompeten. Tuduhan seperti ini tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya bertujuan untuk mendiskreditkan dirinya secara personal, sehingga mengalihkan perhatian dari substansi perjuangan politik atau program kerja yang diusungnya dalam Pemilu 2024. Sebagai seorang perempuan yang aktif di dunia hiburan dan kini terjun ke dunia politik, Bebizie kerap menjadi sasaran komentar bernuansa misoginis yang berakar dari stereotip terhadap perempuan, khususnya mereka yang tampil di ruang publik. Tuduhan seperti ini sering digunakan sebagai cara untuk merusak reputasi politisi perempuan, yang pada akhirnya memperkuat hambatan struktural bagi perempuan dalam politik. Dalam kasus ini, komentar tersebut bukan hanya menyerang Bebizie secara pribadi, tetapi juga mencerminkan tantangan kolektif yang dihadapi perempuan di Indonesia, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemampuan mereka dan fokus yang sering kali salah arah pada kehidupan pribadi mereka. Bebizie memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebagai calon legislatif, di mana publik seharusnya menilai dirinya berdasarkan kapasitas, visi, dan program yang ia tawarkan, bukan berdasarkan isu-isu pribadi yang belum tentu benar.

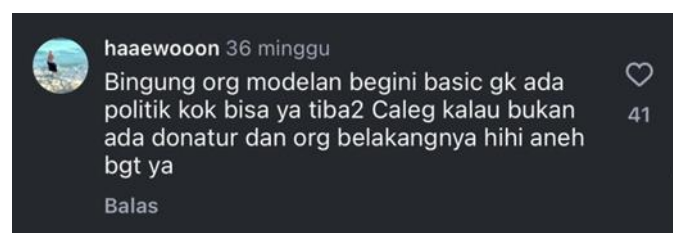


Figure 3: Komentar Negatif pada Unggahan Bebizie
(Sumber: Hasil Tangkapan Layar dari Instagram @bebizie)

Komentar negatif di atas mencerminkan pandangan merendahkan kepada calon legislatif perempuan yaitu Bebizie, dengan mempertanyakan kemampuan dan latar belakang politiknya. Komentar tersebut menyebutkan bahwa Bebizie tidak memiliki dasar yang cukup dalam dunia politik, dan menyiratkan bahwa keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif lebih disebabkan oleh adanya dukungan dari donator atau orang belakang, daripada prestasi atau kemampuan pribadinya. Ungkapan ini mencerminkan anggapan bahwa perempuan dalam politik sering kali tidak dihargai atas kapasitas mereka sendiri, melainkan dianggap sebagai hasil dari dukungan pihak lain yang memiliki kekuasaan atau kepentingan

tertentu. Komentar ini juga mencerminkan budaya patriarki yang masih kuat dalam pandangan masyarakat, terutama di dunia politik yang didominasi oleh laki-laki. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap tidak layak atau tidak mampu untuk memimpin atau menduduki posisi-posisi penting, kecuali jika didukung oleh kekuatan laki-laki atau pihak tertentu. Hal ini menggambarkan adanya diskriminasi gender yang menghambat kemajuan dan partisipasi perempuan dalam politik. Selain itu, komentar tersebut juga mencerminkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem politik, yang sering kali menganggap pencalonan seorang caleg lebih dipengaruhi oleh faktor uang dan kekuasaan, daripada kompetensi atau visi politik yang jelas.

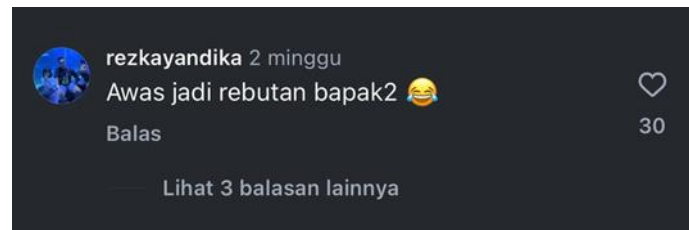


Figure 4: Komentar Negatif pada Unggahan Bebizie
(Sumber: Hasil Tangkapan Layar dari Instagram @bebizie)

Komentar negatif yang terakhir adalah komentar yang mengandung unsur seksisme, yaitu merendahkan perempuan dengan menghubungkan identitas mereka sebagai figur publik dengan stereotip gender dan daya tarik fisik, bukannya menilai melalui kemampuan atau visi politik mereka. Dalam konteks ini, budaya patriarki yang memprioritaskan laki-laki dalam ruang publik, termasuk politik, cenderung memandang perempuan bukan berdasarkan kapabilitas mereka, tetapi melalui aspek-aspek yang dianggap "menghibur" atau terkait dengan tubuh perempuan. Komentar semacam ini juga menunjukkan bagaimana perempuan yang mencoba masuk ke dunia politik sering kali menghadapi serangan berbasis gender. Bukannya didukung atas dasar partisipasi mereka dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, mereka justru menerima komentar yang berusaha mendiskreditkan integritas dan profesionalisme mereka. Komentar tersebut, meskipun diungkapkan dengan nada bercanda, tetap menyiratkan pandangan merendahkan, bahwa kehadiran perempuan di politik hanya dianggap sebagai objek godaan laki-laki, bukan sebagai aktor yang kompeten dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini tidak hanya menjadi hambatan psikologis bagi calon legislatif perempuan, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang lebih besar dalam mewujudkan kesetaraan gender.

4.2. Menghadapi Patriarki dan Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Budaya patriarki secara signifikan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan, termasuk sosok seperti Bebizie. Patriarki, yang mengakar kuat dalam struktur sosial di Indonesia, menciptakan bias gender yang berujung pada marginalisasi perempuan dalam ranah politik. Hal ini tercermin dalam stereotip tradisional yang menempatkan perempuan lebih layak berada dalam peran domestik daripada publik. Akibatnya, banyak pihak yang meragukan kemampuan perempuan dalam politik, terutama jika mereka tidak memenuhi norma-norma gender yang konvensional. Budaya patriarki membatasi partisipasi politik perempuan melalui konstruksi sosial yang meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan, meskipun mereka memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Dominasi laki-laki dalam struktur sosial dan politik dianggap sebagai hal yang normatif, sehingga memengaruhi penerimaan terhadap perempuan dalam posisi-posisi politik. Peran perempuan dalam politik juga sering dianggap sebagai bentuk "tokenisme", di mana kehadiran mereka lebih dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan formal ketimbang menciptakan keterwakilan yang substansial (Nurcahyo, 2016). Kegagalan calon legislatif perempuan dalam Pemilu seringkali disebabkan oleh budaya patriarki yang melemahkan akses perempuan terhadap sumber daya politik, seperti jaringan, dukungan finansial, dan akses media (Nimrah dan Sakaria, 2015).

Persepsi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama bagi calon legislatif perempuan, karena mereka sering kali dihadapkan pada kritik yang bersifat personal, seperti penampilan fisik atau latar belakang kehidupan pribadinya, daripada penilaian substantif terhadap kapasitas dan visi politik mereka. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi figur seperti Bebizie, yang mungkin menghadapi penilaian ganda, baik sebagai perempuan, maupun sebagai individu yang terasosiasi dengan citra populer di luar dunia politik. Selain itu, budaya patriarki juga memperkuat bias internal pada perempuan itu sendiri, di mana banyak perempuan yang menginternalisasi pandangan bahwa politik adalah dunia laki-laki. Akibatnya, dukungan elektoral dari sesama perempuan sering kali tidak cukup kuat untuk menopang calon legislatif perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendekonstruksi norma patriarki dalam masyarakat, salah satunya melalui pendidikan gender. Pendidikan dan literasi gender memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, masyarakat dapat lebih menerima kehadiran perempuan dalam ruang publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan gender memiliki korelasi positif dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik, khususnya di negara berkembang (Tripp dan Kang, 2008). Upaya pendidikan ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti di sekolah, pelatihan masyarakat, serta kampanye di media sosial yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender.

Penerapan kebijakan kuota gender telah terbukti efektif dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi juga membantu mengubah struktur politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki (Krook, 2020). Di Indonesia, Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa partai politik wajib mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih terlihat dalam dunia politik, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Selain kebijakan struktural, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan juga merupakan langkah penting. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kapasitas perempuan dalam memahami sistem politik serta mengasah keterampilan mereka sebagai pemimpin. Kehadiran perempuan sebagai politisi yang sukses dapat menjadi teladan bagi generasi muda, khususnya perempuan, sehingga mendorong mereka untuk lebih berani berpartisipasi dalam politik (Campbell dan Wolbrecht, 2006).

Salah satu hambatan besar yang dihadapi perempuan dalam politik adalah kekerasan berbasis gender, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun digital. Kekerasan semacam ini tidak hanya merusak mental perempuan, tetapi juga menimbulkan rasa takut di kalangan perempuan lainnya untuk terlibat dalam dunia politik. Dalam konteks ini, keberhasilan Bebizie dalam memenangkan kontestasi politik pada Pemilu 2024 menjadi contoh penting bahwa perempuan mampu berpartisipasi dan berhasil di ranah politik meskipun menghadapi berbagai tantangan besar. Mendorong solidaritas di antara perempuan juga dapat memperkuat posisi mereka dalam politik. Aliansi lintas kelompok perempuan memiliki potensi untuk mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender (Celis et al., 2013). Solidaritas ini dapat diwujudkan melalui pembentukan jaringan lintas sektor yang memungkinkan perempuan saling berbagi pengalaman dan strategi. Di Indonesia, terdapat beberapa aliansi lintas kelompok perempuan yang mendukung upaya tersebut, seperti FAMM Indonesia (Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia) dan KPP RI (Kaukus Perempuan Parlemen RI). Dengan dukungan semacam ini, perempuan seperti Bebizie dapat lebih mudah berkembang dalam dunia politik, dan membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memimpin serta membawa perubahan signifikan.

Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dedikasi dan semangat, Bebizie akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan 3. Keberhasilannya ini bukan hanya sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi simbol kemajuan perempuan dalam politik, meskipun mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kekerasan berbasis gender. Pada awal masa jabatannya, Bebizie langsung menunjukkan komitmennya dengan membuktikan bahwa kehadirannya di parlemen bukan hanya bersifat simbolis. Ia

mengedepankan kinerja nyata melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan keahlian, keberanian, dan tekad yang kuat, Bebizie berhasil mematahkan stereotip yang menganggap perempuan hanya sebagai pelengkap dalam dunia politik. Ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia untuk terus berjuang meraih impian, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa, serta memperkuat solidaritas untuk mendorong kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan politik. Bebizie membuktikan bahwa perempuan jika diberi kesempatan dan kepercayaan, mereka mampu memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki. Bebizie adalah contoh nyata bahwa semangat, kerja keras, dan dedikasi dapat membawa seseorang ke posisi di mana ia benar-benar mampu membuat perbedaan.

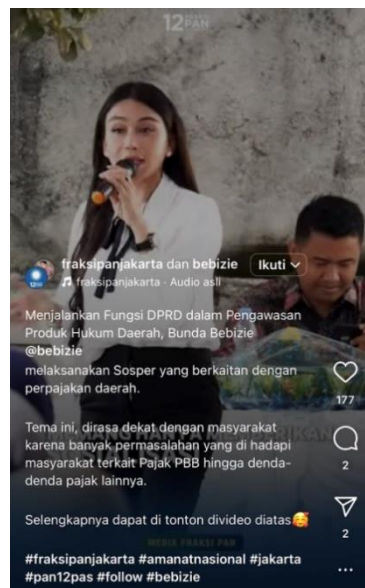


Figure 5: Bebizie melakukan Sosialisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah
(Sumber: Hasil Tangkapan Layar dari Instagram @bebizie)

Kehadiran Bebizie sebagai salah satu tokoh perempuan dalam DPRD DKI Jakarta membuktikan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar simbolis, melainkan memiliki dampak nyata bagi perubahan dan kemajuan. Sebagai anggota legislatif, Bebizie menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap produk hukum daerah, termasuk mengawasi dan memberikan masukan terkait berbagai kebijakan yang dibuat di tingkat legislatif. Melalui sosialisasi peraturan daerah (sospers), Bebizie berupaya menjelaskan secara langsung kepada masyarakat mengenai berbagai regulasi dan aturan yang berhubungan dengan perpajakan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta denda-denda pajak lainnya. Upaya ini tidak hanya menunjukkan pemahamannya yang mendalam terhadap isu-isu birokrasi, tetapi juga menunjukkan kemampuannya untuk menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dengan cara ini, Bebizie membangun hubungan yang lebih dekat antara pemerintah daerah dengan warga, serta mengurangi ketimpangan informasi yang sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lebih dari sekadar sosialisasi, Bebizie juga memberikan solusi praktis bagi warga yang mungkin kesulitan atau tidak memahami proses pembayaran pajak. Dengan keterlibatannya yang aktif dalam setiap kegiatan, Bebizie membuktikan bahwa perempuan dalam politik tidak hanya memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mampu membawa perubahan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Keterwakilan perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh Bebizie, memiliki

potensi besar untuk menciptakan politik yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat



Figure 6: Bebizie Membantu UMKM Masyarakat
(Sumber: Hasil Tangkapan Layar dari Instagram @bebizie)

Tidak berhenti di sana, dukungan Bebizie terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta menjadi bukti nyata bahwa perempuan dalam politik dapat membawa perubahan langsung yang berdampak bagi masyarakat. Bebizie tidak hanya berbicara dari jauh, tetapi ia hadir di tengah-tengah pelaku usaha kecil, berdialog dengan mereka, mendengarkan keluhan dan tantangan yang mereka hadapi, serta berupaya membantu mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai sumber daya, seperti pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk. Pendekatan yang terjun langsung ini memperlihatkan bahwa politisi perempuan dapat menjadi agen perubahan yang efektif, bukan sekadar figur simbolis dalam politik. Dengan langkah-langkah nyata yang diambil Bebizie, ia mematahkan anggapan bahwa politisi perempuan hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pemanis dalam struktur politik yang didominasi oleh laki-laki. Sebaliknya, Bebizie membuktikan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dan konkret dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Melalui kontribusinya dalam memberdayakan UMKM, Bebizie menepis stigma bahwa perempuan dalam politik minim kontribusi atau hanya fokus pada isu-isu tertentu. Ia menunjukkan bahwa perempuan juga mampu memimpin, mendengar, dan berbuat untuk kepentingan rakyat. Kiprahnya ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, tetapi juga menginspirasi banyak perempuan lainnya untuk berani masuk dan berkontribusi dalam dunia politik. Dengan menunjukkan bahwa dunia politik adalah ruang yang juga dapat diisi dengan keberanian dan kompetensi perempuan, Bebizie membantu membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam perubahan dan pembangunan masyarakat.

5. Conclusion

Penelitian ini menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi calon legislatif perempuan di Indonesia, khususnya dalam konteks budaya patriarki yang masih mengakar kuat sampai saat ini. Melalui analisis komentar negatif yang diterima oleh Bebizie di media sosial Instagramnya, dapat kita lihat bahwa stereotip gender dan prasangka sosial terus berlanjut, dan dapat menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam politik. Komentar-komentar tersebut tidak hanya menyerang individu, tetapi juga mencerminkan pandangan masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk mengembangkan strategi yang dapat mendukung keberhasilan

perempuan dalam politik. Upaya pendidikan gender, penerapan kebijakan kuota, dan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan merupakan langkah-langkah penting yang dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Selain itu, dukungan dari sesama perempuan dan solidaritas dalam komunitas politik juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tetapi juga menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi perempuan di dunia politik. Keterlibatan aktif perempuan seperti Bebizie dalam proses politik, diharapkan dapat menginspirasi generasi mendatang untuk berani mengambil peran dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Kesetaraan gender dalam politik bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih adil dan inklusif.

References

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131-136.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (2006). *Dasar-dasar penelitian kualitatif* (diterjemahkan oleh M. Moleong). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Brewer, M. B., & et al. (2001). Psychological aspects of gender. *Journal of Social Psychology*, 35(2), 112-128.
- Campbell, D. E., & Wolbrecht, C. (2006). See Jane run: Women politicians as role models for adolescents. *The Journal of Politics*, 68(2), 233-247.
- Dwitasari, Y., Murtasidin, B., & Hidayat, N. (2024). Personal Branding Caleg Perempuan Terpilih Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Provinsi Kep. Bangka Belitung: (Studi Pada Kemenangan Melati Dan Dinda Rembulan). *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(5), 1-13.
- Fachrani, J. I. A. A. (2015). Manifestasi wanita dalam budaya patriarki: ideologi dalam Serat Candraning Wanita dan refleksi pada iklan era modern. *Jurnal Linguistik Terapan*, 1-14.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Doubleday.
- Inwantoro, T., & Herawati, N. R. (2014). Faktor penghambat serta Pendorong Perempuan untuk Maju sebagai Calon Legislatif pada Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Mojokerto. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 346-355.
- Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). Gender and political violence in Latin America: Concepts, debates, and solutions. *Política y Gobierno*, 23(1), 125-161.
- Krook, M. L. (2020). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press.
- Kurniawan, A. (2023, September 28). Judith Butler: Memahami gagasan filsafat bahwa gender tidak biologis, tapi performatif. *The Conversation*.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maharani, I. S., Nugraha, A., & Pratama, R. K. (2024). Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3042-3048.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Jurnal Agastya*, 6(1), 25-34.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173-181.
- O'Neil, T., & Domingo, P. (2016). *Women and power: Overcoming barriers to leadership and influence*. Overseas Development Institute.
- Putri, S. W., & Fridiyanti, Y. N. (2024). Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 13-20.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sanderson, S. K., & Stephen, K. (2001). *Sociology: A global perspective* (5th ed.). Wadsworth Publishing.
- Salih, S. (2006). Judith Butler: Selections from the interview. *Gender Studies*, 18(4), 25-40.
- Tripp, A. M., & Kang, A. (2008). The global impact of quotas: On the fast track to increased female legislative representation. *Comparative Political Studies*, 41(3), 338–361.
- Universitas Kristen Satya Wacana. Representasi patriarki dari sudut pandang teori struktural. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Yusalia, R. (2014). Budaya patriarki dan peran gender dalam masyarakat. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(3), 45-58.